

Abstrak

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Jawa Timur didasar kanpada UU No 13 tahun 2003, Keputusan Presiden No 20 Tahun 2018, Permenaker No 16 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Jatim No 8 Tahun 2016. Tenaga kerja Asing yang berkerja di jawa timur tentunya harus melalui prosedur dan ketentuan perizinan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menarik peneliti karena ditemukan adanya Tenaga kerja Asing yang sudah habis masa kontrak kerjanya namun masih tetap berkerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan apakah keberadaan Tenaga kerja Asing telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana pelaksanaan pengawasan Tenaga kerja Asing di jawa timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam pengambilan data penelitian ini dilakukan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi, pihak imigrasi kelas 1 surabaya, serta pihak perusahaan yang memeperkerjakan tenaga kerja asing. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang memberikan pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kalau Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini juga telah dilakukan oleh PT Tatsumi Seruni dalam proses perekrutan dan pe nggunaan Tenaga Kerja Asing telah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Namunizin yang digunakan Tenaga Kerja Asing tersebut ialah izin yang pertama kali diurus dimasa mulai nya berkerja, disini Tenaga kerja Asing mengabaikan izin kontrak Tenga kerja Asing tanpa melalui Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA). Disini pemerintah berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar berupa sanksi administrative seperti penundaan pelayanan, penghentian proses Tenaga kerja Asing, pencabutan notifikasi, serta sanksi lainnya yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan, peraturan presiden no 20 tahun 2018 pasal 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap tenaga kerja asing yang berkerja di perusahaan terutama di kawasan jawa timur dan melakukan koordinasi serta meningkatkan hubungan dengan perusahaan sebagai pemberi kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang dibantu oleh pihak Imigrasi selaku pengawas serta pemberi izin tinggal bagi tenaga kerja asing supaya tidak ada lagi pelanggaran perpanjangan kontrak Tenaga Kerja Asing.

Kata kunci :Pengawasan, Penggunaan Perizinan, Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK

The use of Foreign Workers (TKA) in East Java is based on Law No. 13 of 2003, Presidential Decree No. 20 of 2018, Permenaker No. 16 of 2015 and East Java Regional Regulation No. 8 of 2016. Foreign workers who work in East Java certainly have to go through labor licensing procedures and conditions in Indonesia. This is interesting because researchers found that there are foreign workers who have expired their employment contracts but are still working. Therefore, this study was conducted to explain whether the presence of Foreign Workers is in accordance with applicable legal provisions and how the implementation of supervision of Foreign Workers in East Java.

The research method used in this research is empirical juridical, while the approach taken uses a qualitative approach that is combined with the statutory approach and case approach. In the data collection this research was conducted at the employment and transmigration department, the immigration class 1 Surabaya, and parties companies that employ foreign workers. Analysis of the data used in this research is descriptive analysis, which is a research procedure that provides exposure to the object of research as the results of the study were conducted.

The results of this study indicate that the use of foreign workers in East Java in implementation has been in accordance with these provisions. This has also been done by PT Tatsumi Seruni in the process of recruiting and using Foreign Workers in accordance with labor regulations. However, the permission used by the Foreign Workers is the permit that was first administered at the time it started to work, here the Foreign Workers ignore the permission of the Foreign Workers contract without going through the Permit to Extend Foreign Workers (IMTA). Here the government has the right to give sanctions to companies that are proven to violate administrative sanctions such as service delays, termination of the process of Foreign Workers, revocation of notifications, as well as other sanctions contained in the legislation, presidential regulation no 20 of 2018 article 34 concerning the use of labor foreign. Therefore, the government is expected to provide more optimal supervision of foreign workers who work in companies, especially in the area of East Java and coordinate and improve relations with companies as employers with the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office assisted by the Immigration as supervisors and granting a residence permit for foreign workers so that there are no more violations of contract extension of Foreign Workers.

Keywords: Supervision, Use of Permits, Foreign Workers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xip
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	10
1.6.4 Jenis Data dan Sumber Hukum	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.6 Analisis Data.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENAGA KERJA ASING.....	15
2.1 Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	15
1. Tenaga Kerja.....	16
2. Perusahaan	16
3. Pemerintah	19
2.2 Tenaga Kerja Asing dan Penempatan Tenaga kerja Asing.....	21
2.3 Pengawasan Tenaga Kerja Asing	26
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI JAWA TIMUR.....	31
3.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur...	31
3.2 Pengaturan Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur	35
1. UU No 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan.....	36

2. Peraturan Keputusan Presiden No 20 Tahun 2018	44
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 16 Tahun 2015 Tentang Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	45
4. Peraturan Pemerintah Daerah.....	48
3.3 Pengawasan Pelaksanaan Tenaga Kerja Asing di Jawa Timur.....	50

BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
BIODATA PENULIS	72